

REDESAIN DAN OPTIMALISASI BALAI RUKUN WARGA (RW) SEBAGAI EPISENTRUM AKTIVITAS DAN PEMBERDAYAAN KOMUNITAS LOKAL

Bagus Suryanto^{1*}, Ahmad Khoiri², Kurniawati Mutmainah³, Nurma Khusna Khanifa⁴

¹⁻⁴ Universitas Sains Al-Qur'an Jawa Tengah di Wonosobo

*Penulis Korespondensi: bagussuryanto4127@gmail.com

Abstract. *The optimization of public infrastructure is a fundamental pillar of community service aimed at addressing the socio-spatial needs of urban residents. The Rukun Warga (RW) hall in Kampung Pongangan RT 03 RW 12, Wates Village, Magelang City possesses significant latent potential to be transformed into an integrated community hub. This participatory community service project was collaboratively executed by lecturers and students through a systematic framework involving local government coordination, field site surveys, structural measurements of the existing layout, and advanced architectural drafting using computer-aided design (CAD) software. The definitive outputs encompass comprehensive architectural documents, including detailed floor plans, multi-perspective elevations (front, side, and rear views), and high-fidelity three-dimensional renderings. The proposed spatial configuration emphasizes a hybrid functionality, positioning the RW hall not only as a formal administrative meeting space but also as an inclusive arena for social cohesion, non-formal education, cultural preservation, and grassroots economic acceleration. The visual blueprints received highly favorable validation from village executives and community representatives, establishing a robust framework for execution towards a more productive, adaptive, and sustainable public facility.*

Keywords: *RW hall, community hub, spatial planning, grassroots empowerment, participatory design.*

Abstrak. Optimalisasi infrastruktur publik merupakan pilar fundamental dalam pengabdian masyarakat yang bertujuan untuk menjawab kebutuhan sosio-spasial warga. Gedung Balai Rukun Warga (RW) di Kampung Pongangan RT 03 RW 12, Kelurahan Wates, Kota Magelang memiliki potensi laten yang signifikan untuk ditransformasikan menjadi pusat kegiatan komunitas terpadu. Program pengabdian partisipatif ini dilaksanakan secara kolaboratif oleh dosen dan mahasiswa melalui kerangka kerja sistematis yang meliputi koordinasi dengan aparatatur kelurahan, survei lokasi, pengukuran struktural bangunan eksisting, dan perancangan arsitektur menggunakan perangkat lunak digital. Output definitif dari program ini mencakup dokumen arsitektural komprehensif, termasuk denah lantai, gambar tampak multi-perspektif (depan, samping, dan belakang), serta simulasi visual tiga dimensi (3D). Konfigurasi spasial yang diusulkan menekankan pada fungsionalitas hibrida, memosisikan Balai RW tidak hanya sebagai ruang pertemuan administratif formal, melainkan juga sebagai arena inklusif bagi kohesi sosial, edukasi non-formal, pelestarian budaya, dan akselerasi ekonomi akar rumput. Cetak biru visual ini memperoleh validasi positif dari pengurus lingkungan dan perwakilan warga, sehingga menjadi landasan kokoh menuju pembangunan fasilitas publik yang produktif, adaptif, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *balai RW, pusat komunitas, perencanaan spasial, pemberdayaan masyarakat, desain partisipatif.*

1. LATAR BELAKANG

Pembangunan perkotaan yang berkelanjutan saat ini tidak lagi sekadar bertumpu pada indikator kuantitatif pertumbuhan ekonomi makro atau ekspansi infrastruktur fisik berskala megah. Lebih dari itu, tingkat resiliensi suatu komunitas masyarakat urban sangat bergantung pada ketersediaan dan kualitas fasilitas sosial yang mampu mewadahi

interaksi kolektif warga secara harmonis (Yatimah, 2025). Fasilitas publik yang dirancang secara matang memiliki nilai strategis dalam menstimulasi modal sosial (*social capital*), mempererat ikatan emosional antarwarga, serta menyediakan ruang aman (*safe space*) untuk bermusyawarah dalam memecahkan problematika lokal. Keberadaan ruang komunal skala mikro seperti ini menjadi determinan penting dalam meningkatkan indeks kebahagiaan warga kota, memperkuat struktur sosial, dan memicu partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan wilayah (Amalia, 2024). Di lingkup tataran tata pamong terkecil di Indonesia, Balai Rukun Warga (RW) merupakan salah satu episentrum fasilitas sosial yang memegang peranan krusial tersebut.

Secara historis dan konvensional, Balai RW kerap dipersepsikan sebatas fasilitas birokrasi tingkat bawah—sebuah ruang kaku yang hanya digunakan untuk rapat rutin warga, tempat penyimpanan inventaris lingkungan, atau pusat layanan administratif insidental (Heri, 2024). Kendati demikian, infrastruktur ini sesungguhnya menyimpan potensi spasial dan sosial yang jauh lebih masif jika ditransformasikan menjadi ruang serbaguna (*flexible space*). Balai RW dapat didesain ulang untuk mengakomodasi ekosistem aktivitas warga yang dinamis, mulai dari program edukasi anak usia dini, pos pelayanan kesehatan terpadu (Posyandu), hingga inkubator pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas (Jubaedah, 2022). Dengan memperluas spektrum fungsionalnya, Balai RW bertransformasi dari sekadar bangunan fisik pasif menjadi stimulator esensial dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) lokal serta wadah penguatan kapasitas kolektif masyarakat setempat.

Penyediaan ruang publik yang representatif, mudah diakses, dan fungsional terbukti mampu mempercepat proses integrasi sosial serta membangun kohesi di tengah keberagaman warga kota yang heterogen (Angelika, 2024). Balai RW yang mengusung konsep multifungsi dapat menjadi motor penggerak keterlibatan aktif kelompok-kelompok marginal dan organisasi lokal, seperti Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) serta Karang Taruna, untuk menggulirkan program edukasi non-formal, pelatihan vokasional, maupun penyuluhan kesehatan perkotaan (Zakariya, 2025). Melalui pendekatan inklusif ini, ruang publik tidak lagi bersifat eksklusif atau monofaisir, melainkan berubah menjadi ruang komunal yang inklusif, produktif, dan adaptif terhadap dinamika perkembangan zaman.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan yang lebar antara potensi ideal dan kondisi riil di lingkungan perkotaan. Pemanfaatan Balai RW di berbagai daerah masih mengalami fenomena *underutilized* atau beroperasi di bawah kapasitas optimalnya (Ardito, 2023). Keterbatasan luas ruang, tata letak yang kaku, serta minimnya fasilitas penunjang membuat gedung komunal ini sering kali kosong dan hanya diaktifkan pada waktu-waktu tertentu saja. Kondisi ini menegaskan bahwa nilai kemanfaatan Balai RW dalam mengeskalasi kapasitas sosial dan ekonomi warga belum tereksplorasi dengan baik. Oleh sebab itu, diperlukan intervensi strategis berupa perencanaan arsitektural yang matang, reposisi zonasi fungsi ruang, dan integrasi visi pemberdayaan agar ruang publik mikro ini mampu memberikan dampak multiplikasi (*multiplier effect*) terhadap kesejahteraan warga secara merata (Zubizaretta, 2024).

Pengembangan arsitektur komunal yang menyatukan dimensi sosial, edukatif, dan ekonomi secara simultan merupakan kunci utama dalam menciptakan ruang publik yang berkelanjutan. Integrasi multifungsi ini merangsang lahirnya ekosistem warga yang dinamis, di mana masyarakat dapat dengan mudah mengakses ruang literasi perkotaan, mengikuti pelatihan keterampilan industri rumah tangga, sekaligus memasarkan produk lokal secara terorganisasi (Syafiuddin, 2025). Sinergi antarsektor dalam satu atap ini tidak hanya memperkuat ikatan modal sosial, tetapi juga membangun ketahanan komunitas (*community resilience*) dalam menghadapi dinamika disrupsi ekonomi maupun perubahan sosial perkotaan yang kian kompleks (Wirasa, 2022).

Kampung Pongangan RT 03 RW 12 yang terletak di Kelurahan Wates, Kota Magelang, menjadi lokus yang sangat prospektif bagi implementasi program penataan ruang publik mikro ini. Kawasan ini telah memiliki bangunan fisik Balai RW, namun pemanfaatannya masih sangat konvensional dan terbatas pada agenda pertemuan rutin berkala. Di sisi lain, modal sosial berupa semangat gotong royong dan tingkat partisipasi masyarakat urban di Kampung Pongangan tergolong sangat tinggi. Kesenjangan antara potensi sosial yang besar dan keterbatasan fasilitas fisik inilah yang melatarbelakangi urgensi program pengabdian ini. Perencanaan desain arsitektural yang fungsional, estetik, dan berbasis kearifan lokal perkotaan diharapkan mampu mengubah Balai RW Kampung Pongangan RT 03 RW 12, Kelurahan Wates menjadi fasilitas publik terpadu yang mendorong pembangunan masyarakat secara holistik dan partisipatif.

2. METODE PENELITIAN

Program pengabdian masyarakat ini menerapkan metode Perancangan Partisipatif (*Participatory Design Approach*) yang menempatkan interaksi sinergis antara civitas akademika (dosen dan mahasiswa) dengan aparat pemerintah kelurahan serta elemen masyarakat sebagai motor utama kegiatan. Intervensi struktural sengaja didesain untuk menjauhi pendekatan otoritatif sepihak (*top-down*) dan dialihkan pada penggalian aspirasi kolektif dari lapis bawah (*bottom-up*). Paradigma ini diterapkan agar dokumen perencanaan arsitektur yang dihasilkan tidak hanya presisi secara teknis, tetapi juga selaras dengan konteks sosial budaya setempat serta memiliki akseptabilitas tinggi agar dapat dikelola secara mandiri dan berkelanjutan oleh warga dalam jangka panjang.

Sebagai langkah awal operasional program pada tahap pertama, dilakukan konsolidasi formal dalam bentuk audiensi dan rembug bersama perangkat Kelurahan Wates, jajaran pengurus RT 03 RW 12 Kampung Pongangan, serta pemuka masyarakat setempat. Pertemuan strategis ini difungsikan sebagai media untuk menyamakan visi, mengidentifikasi regulasi tata ruang perkotaan di Kota Magelang, serta menyusun nota kesepahaman kolektif guna memitigasi kendala non-teknis serta menjamin kelancaran pelaksanaan seluruh rangkaian program pengabdian di lapangan. Langkah berikutnya pada tahap kedua dilakukan melalui investigasi teknis secara langsung pada tapak Balai RW di Kampung Pongangan RT 03 RW 12 untuk mengumpulkan basis data fisik bangunan eksisting. Aktivitas pada fase ini berfokus pada pengukuran mikro geometris dimensi lahan, penilaian kelayakan teknis struktur utama, analisis iklim mikro (meliputi orientasi lintasan matahari dan pola pergerakan arah angin), serta pemetaan koridor sirkulasi guna mengukur tingkat aksesibilitas eksternal di sekitar kawasan perancangan.

Dalam rangka mengekstraksi kebutuhan riil warga pada tahap ketiga, tim pengabdian menyelenggarakan *Focus Group Discussion* (FGD) terstruktur dan wawancara mendalam dengan melibatkan perwakilan lembaga kemasyarakatan lokal seperti tim penggerak PKK, Karang Taruna, pelaku UMKM, dan tokoh masyarakat Kampung Pongangan. Instrumen kualitatif ini digunakan untuk membedah, mengklasifikasikan, dan menentukan skala prioritas jenis aktivitas sosio-ekonomi warga urban yang mendesak untuk diwadahi dalam program ruang Balai RW yang baru. Selanjutnya pada tahap keempat, data kuantitatif spasial hasil audit fisik dan data

kualitatif hasil FGD disintesis secara komprehensif menjadi matriks hubungan ruang dan program ruang dasar. Tim perancang kemudian memformulasikan konsep tersebut ke dalam ekosistem digital menggunakan perangkat lunak arsitektur mutakhir berbasis *Computer-Aided Design (CAD)* dan *3D Rendering Software* guna memproduksi visualisasi denah tata ruang, gambar tampak, potongan struktural, hingga pemodelan tiga dimensi yang realistik dan presisi.

Draf visualisasi arsitektural yang telah matang kemudian diuji pada tahap kelima melalui forum presentasi terbuka (*Design Review Session*) di hadapan pengurus RT 03 RW 12 Kampung Pongangan beserta perwakilan warga. Ruang dialog transparan ini dibuka secara interaktif untuk menjangkau umpan balik berupa kritik, saran konstruktif, serta penyesuaian fungsi ruang berdasarkan sudut pandang pengguna (*user-centered design*) sebelum konfigurasi arsitektur final dikunci. Seluruh rangkaian metode pelaksanaan ini ditutup pada tahap keenam dengan melakukan penyempurnaan menyeluruh terhadap gambar kerja arsitektur berdasarkan masukan yang diperoleh pada fase uji publik. Hasil akhir dari proses ini berupa dokumen perencanaan teknis komprehensif (cetak biru) yang diserahkan secara legal-formal kepada pihak pengurus lingkungan dan kelurahan sebagai dokumen panduan definitif dan regulasi dasar untuk mengeksekusi pembangunan fisik secara bertahap di Kelurahan Wates, Kota Magelang.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian Berdasarkan hasil investigasi empiris di lapangan, struktur spasial Balai RW di Kampung Pongangan saat ini masih merepresentasikan tipologi infrastruktur konvensional dengan fungsionalitas tunggal yang kaku. Komponen utama bangunan didominasi oleh sistem atap pelana sederhana, komponen dinding semi-permanen, serta pembagian ruang interior yang cenderung sempit dan monoton. Pola pemanfaatan gedung sejauh ini juga masih bersifat reaktif-insidental, yakni sebatas sebagai wadah rapat pleno pengurus lingkungan atau pelayanan birokrasi berkala. Ketiadaan elemen interior penunjang dan perencanaan zonasi yang matang memicu rendahnya tingkat okupansi aktivitas warga. Akibatnya, manifestasi Balai RW sebagai ruang publik yang inklusif belum berjalan secara optimal, sehingga keterbatasan fisik ini memuat potensi laten yang besar untuk direkonstruksi menjadi sebuah fasilitas komunal yang adaptif bagi seluruh elemen masyarakat.



Gambar 1. Kondisi eksisting Balai RW di Desa Pongangan

Analisis lanskap makro di sekitar tapak menunjukkan adanya cadangan area terbuka (*open space*) yang memadai dan belum termanfaatkan secara optimal. Sisa lahan publik tersebut menyimpan potensi spasial yang tinggi untuk dikonversi menjadi zona interaksi sosial aktif, koridor hijau perkotaan, maupun pelataran edukasi luar ruangan bagi masyarakat lokal. Ketersediaan ruang ini menjadi stimulus penting untuk mereorientasi fungsi arsitektur Balai RW—dari yang semula sekadar ruang rapat formal yang monoton, beralih menjadi sebuah episentrum komunitas terpadu (*integrated community center*) yang mampu mewadahi aktivitas kultural, sosial, pendidikan, dan penguatan ekonomi warga secara simultan.

Guna mewujudkan visi tersebut, tim pelaksana program pengabdian merumuskan konsep *redesign* bangunan dengan mengedepankan prinsip fleksibilitas ruang hibrida yang adaptif. Konfigurasi arsitektural yang baru ini dirancang untuk memenuhi dua fungsi utama, yakni penyediaan aula musyawarah komunal yang ergonomis serta penyediaan ruang penunjang (*annex space*) modular untuk memfasilitasi lokakarya vokasional dan edukasi non-formal. Seluruh pemodelan teknis ini dimanifestasikan ke dalam cetak biru dokumen arsitektural komprehensif, mulai dari pemetaan denah tata ruang, proyeksi gambar tampak, hingga visualisasi tiga dimensi (3D) realistik menggunakan perangkat lunak digital mutakhir.



Gambar 2. Desain visual 3D tampak depan balai RW hasil pengembangan

Dalam dokumen perencanaan yang dirumuskan, area pekarangan luar ditata secara terintegrasi menjadi ruang publik aktif yang adaptif guna mewadahi aktivitas sosial, edukasi non-formal, serta rekreasi masyarakat perkotaan. Penerapan konsep *edible garden* (taman pangan produktif) dan pelataran komunal luar ruangan dihadirkan sebagai instrumen lanskap guna meningkatkan nilai produktivitas lingkungan sekaligus memperkokoh ikatan kohesi sosial antarwarga.

Sementara pada sektor interior, efisiensi tata ruang dicapai melalui penerapan sistem zonasi makro yang presisi untuk memisahkan sirkulasi aktivitas secara teratur. Ruang dalam bangunan dibagi menjadi beberapa kompartemen fungsional khusus, meliputi unit pelayanan administrasi, ruang tunggu interaktif, studio pelatihan modular, serta koridor galeri untuk mempromosikan komoditas ekonomi kreatif (UMKM) lokal. Pendekatan desain interior yang diusulkan ini menitikberatkan pada aspek higienitas dan estetika profesional tanpa menghilangkan atmosfer kehangatan yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.



Gambar 3. Denah balai RW hasil pengembangan



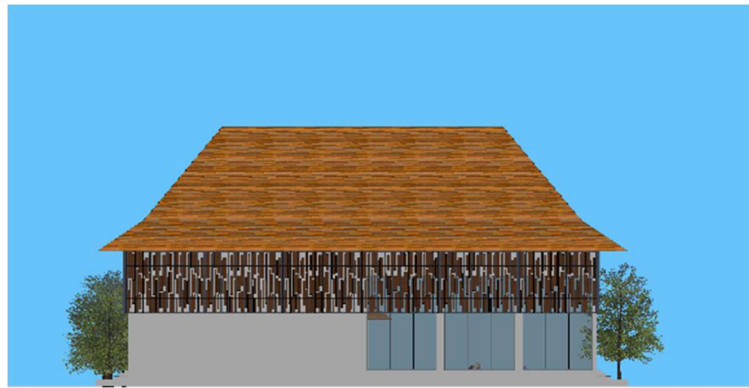
Gambar 4. Tampak Depan balai RW hasil pengembangan



Gambar 5. Tampak samping kanan balai RW hasil pengembangan



Gambar 6. Tampak samping kiri balai RW hasil pengembangan



Gambar 7. Tampak belakang balai RW hasil pengembangan

Perumusan konsep arsitektural ini mengimplementasikan metode perencanaan partisipatif (*participatory planning*) dengan melibatkan jajaran birokrasi kelurahan, pengurus lingkungan, serta keterwakilan warga Kampung Pongangan secara intensif. Konstruksi desain tidak diproduksi searah, melainkan melalui dialektika rembug warga, jajak pendapat, dan forum konsultasi berkala guna mengekstraksi kebutuhan serta preferensi spasial masyarakat perkotaan secara mendalam. Umpan balik akar rumput tersebut diposisikan sebagai variabel utama dalam menyempurnakan cetak biru teknis agar infrastruktur yang terbangun memiliki relevansi sosiologis, kultural, dan kontekstual terhadap karakteristik sosiodemografi setempat. Intervensi kolaboratif ini terbukti mampu mengeskalisasi rasa memiliki (*sense of belonging*) kolektif, sekaligus menjadi stimulus bagi keterlibatan aktif warga dalam tata kelola dan pemanfaatan fasilitas di masa depan.

Lebih dari sekadar pembenahan fisik, cetak biru Balai RW Kampung Pongangan RT 03 RW 12, Kelurahan Wates ini diproyeksikan dalam spektrum yang lebih luas sebagai katalisator pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) berkelanjutan. Infrastruktur publik ini didesain sebagai wadah inkubator modular yang adaptif untuk memfasilitasi berbagai program peningkatan kapasitas warga, mulai dari kursus keterampilan praktis, penyuluhan kesehatan berkala, kelas literasi anak, hingga pembinaan program ekonomi kreatif. Transformasi peran ini mengonversi bangunan dari sekadar tempat rapat formal yang kaku menjadi ruang aman (*safe space*) yang inklusif, mempererat ikatan modal sosial, serta memicu interaksi komunal yang positif antarwarga.

Ditinjau dari pendekatan arsitektur, gubahan massa Balai RW ini mengawinkan prinsip arsitektur modern yang efisien dengan artikulasi vernakular lokal secara harmonis melalui filosofi simbolik-fungsional. Geometri atap tradisional dipertahankan secara konsisten sebagai representasi memori kolektif dan pelestarian identitas budaya, sedangkan tata mukanya diberikan sentuhan minimalis untuk menonjolkan kesan fleksibilitas ruang, transparansi publik, dan efisiensi energi. Komposisi material, pemilihan palet warna yang bersahabat, serta permainan volume ruang dikalkulasikan secara cermat agar menghadirkan estetika visual yang dinamis namun tetap selaras dengan ekosistem permukiman sekitar.

Secara menyeluruh, hasil perancangan Balai RW di Kampung Pongangan memberikan preseden akademis dan praktis mengenai pemodelan ruang publik skala mikro yang berbasis komunitas dan multifungsi. Bangunan ini tidak hanya menuntaskan fungsi utilitarian dasar sebagai tempat pertemuan, melainkan juga mengambil peran strategis dalam menopang resiliensi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat perkotaan. Melalui perpaduan desain kontekstual dan prinsip pemberdayaan, Balai RW bertransformasi menjadi simbol progresif bagi perubahan sosial lokal yang inklusif dan berkelanjutan, sekaligus membuktikan bahwa keterlibatan aktif warga merupakan kunci utama dalam melahirkan infrastruktur sosial yang berdampak nyata.

4. KESIMPULAN

Proses perencanaan dan perancangan arsitektural untuk pengembangan Gedung Balai Rukun Warga (RW) di Kampung Pongangan RT 03 RW 12, Kelurahan Wates, Kota Magelang telah diselesaikan secara komprehensif melalui pendekatan yang holistik, ilmiah, dan partisipatif. Transformasi spasial ini dirumuskan berdasarkan integrasi data teknis lapangan dengan aspirasi sosial yang diserap langsung melalui pelibatan aktif warga perkotaan setempat. Hasil akhir perencanaan membuktikan bahwa dengan rekayasa spasial yang tepat, Balai RW mampu meningkatkan perannya secara radikal dari sebuah bangunan administratif yang pasif dan kurang termanfaatkan (*underutilized*) menjadi sebuah episentrum kegiatan komunitas yang dinamis, inklusif, dan multifungsi guna memfasilitasi kebutuhan sosial, pendidikan, budaya, serta akselerasi ekonomi mandiri berbasis warga.

Penerimaan yang sangat positif dan antusias dari aparat kelurahan, pengurus lingkungan, serta seluruh elemen masyarakat menunjukkan bahwa metode perancangan partisipatif mampu menumbuhkan rasa kepemilikan psikologis (*psychological ownership*) yang kuat sejak fase perencanaan awal. Rasa memiliki ini menjadi garansi sosial yang penting bagi keberlanjutan pemeliharaan dan pemanfaatan gedung komunal di masa depan. Dokumen cetak biru (*blueprint*) visual tiga dimensi serta gambar kerja teknis yang dihasilkan kini berfungsi sebagai dokumen kebijakan pembangunan formal bagi lingkungan Kampung Pongangan RT 03 RW 12, Kelurahan Wates dalam mengalokasikan anggaran konstruksi fisik secara bertahap, efisien, dan terukur.

Lebih jauh, model pendekatan pengembangan Balai RW multifungsi yang diterapkan di Kampung Pongangan RT 03 RW 12 ini memiliki nilai aplikatif yang tinggi untuk direplikasi di wilayah-wilayah kelurahan atau perdesaan lainnya. Fleksibilitas metode perancangan ini memungkinkan penyesuaian desain secara adaptif dengan karakteristik geografis, potensi ekonomi lokal, serta keunikan budaya masyarakat perkotaan setempat. Dengan demikian, optimalisasi ruang publik skala mikro seperti Balai RW perkotaan sejatinya merupakan langkah strategis yang sangat efektif dalam memperkuat infrastruktur sosial dan memperkuat ketahanan komunitas (*community resilience*) dari tingkat akar rumput terkecil.

DAFTAR REFERENSI

- Amalia, A., Heryati, Y., & Herman, H. (2024). Pemberdayaan Masyarakat Desa Galung Lombok, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar Melalui Pendekatan Desa Go Green Berbasis Nilai-Nilai Spiritual. *E-Amal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(3), 1621-1636.
- Angelika, S. T., Fadjarajani, S., & Darmawan, C. (2024). Pengaruh Revitalisasi Alun-alun Dadaha terhadap Pertumbuhan Sosial Ekonomi Wilayah Tasikmalaya. *SOSIAL: Jurnal Penelitian Sosial*.
- Ardito, M. M R., & Puspaningtyas, A. (2023). Efektivitas Program Puspaga dalam Meningkatkan Kehidupan dan Ketahanan Keluarga di Tingkat Balai RW. *Jurnal Media Administrasi*, 8(2), 53-60.
- Heri, A. (2024). Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 4(3), 1376-1388.
- Jubaedah, E. (2022). Evaluasi Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan Dan Pemberdayaan Kewilayahan (Pippk) Di Kelurahan Sukaluyu Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung. *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi*, 6(1), 410-417.

- Syafiuddin, S., Rohman, N., Yunus, Y., Umam, K., Rizal, S., Junaidi, J., ... & Abdurrohman, A. (2025). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Pertanian Berkelanjutan di Dusun Tambes Desa Lerpak Geger Bangkalan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan*, 5(2).
- Wirasa, I. D. G. (2022). Pengaruh Activity Support Terhadap Aktivitas Ruang Publik pada Malam Hari di Koridor Jalan Gajah Mada Amlapura. *PADURAKSA: Jurnal Teknik Sipil Universitas Warmadewa*, 11(1), 82-93.
- Yatimah, D., & Adman, A. (2025). Strategi Pemberdayaan Masyarakat. *Bayfa Cendekia Indonesia*.
- Zakariya, A. F., Sunarya, W., & Susanti, W. D. (2025). Bantuan perencanaan dan sosialisasi desain Balai RW 06 Medokan Asri Barat Surabaya. *Penamas: Journal of Community Service*, 5(1), 159-169.
- Zubizaretta, Z. D., Suhartono, B. R., Kusuma, J. D. J., & Andriani, L. F. (2024, September). Pengembangan Urban Farming dan Sertifikasi Halal Produk UMKM: Inisiasi Kemandirian Masyarakat Kelurahan Tanjungrejo, Kota Malang. In *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat Universitas Ma Chung* (Vol. 5, pp. 22-36).